

ANALISIS IMPLEMENTASI E-BUDGETING MENGGUNAKAN MODEL CIPP (CONTEXT, INPUT, PROCESS, AND PRODUCT) SERTA DAMPAKNYA TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PUBLIK DI SKPD KABUPATEN KARANGASEM

Ni Ketut Erna Kartika Lestari¹, I Gusti Ayu Purnamawati²

Jurusan Ekonomi Akuntansi
Prodi S1 Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: ketut.erna30@gmail.com¹, igapurnamawati@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem *E-budgeting* dengan menggunakan model CIPP dan dampaknya terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik di SKPD Kabupaten KARangasem. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, dengan mengambil sampel delapan SKPD dari total keseluruhan SKPD di Kabupaten Karangasem. SKPD yang dijadikan sampel di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, Camat Bebandem, Camat Karangasem, dan Camat Karangasem. Adapun simpulan dari penelitian ini adalah Implementasi sistem *e-budgeting* di SKPD Kabupaten Karangasem yang ditinjau melalui model CIPP adalah dimana sistem *e-budgeting* dapat mempermudah dan memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan keuangan publik sehingga harapan dari diimplementasikannya sistem tersebut bisa terpenuhi walaupun belum maksimal, Implementasi *e-budgeting* memberikan dampak terhadap transparansi dan akuntabilitas di lingkungan SKPD Kabupaten Karangasem, walaupun tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik masih belum berjalan optimal karena factor peranan masyarakat yang masih belum berjalan dengan baik.

Kata kunci: *E-budgeting*, CIPP, Transparansi, Akuntabilitas

Abstract

The research was aimed to analyse the role of e-budgeting system application by using CIPP model, and its impact on the transparency and accountability of public finance on SKPD in Karangasem regency. The research was done in Karangasem regency of Bali Province, by taking eight Skpd samples from all of skpd in karangasem regency. Those samples were Department for environment, department of agriculture, department of education youth and sport, department of public works, department of Koperasi, chief of Bebandem district, and chief of Karangasem district. As for the conclusion of the research was the implementation of e-budgeting system on SKPD in Karangasem regency reviewed through CIPP model could give significant benefits in public finance management, so that the goal of this system implementation can be reached as much as possible. The implementation of e-budgeting system gave impact to transparency and accountability on skpd in karangasem regency, though the level of transparency and accountability of public finance management has not yet running optimally, because of the factor of society's role which has not yet played well.

Keywords : *E-budgeting*, CIPP, Transparency, Accountability

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di jaman sekarang memicu terjadinya efisiensi di segala sektor masyarakat. Pengaruh dari kemajuan teknologi, tidak hanya dapat dirasakan pada bidang bisnis, namun juga pada bidang pemerintahan yang mengalami kemajuan dari segi teknologi. Pemanfaatan teknologi sangatlah penting, karena bisa membuat pekerjaan semakin efektif dan efisien. Khususnya pada bidang pemerintahan, kemajuan teknologi diharapkan bisa menjadikan sistem pemerintahan menjadi semakin transparan dan akuntabel. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui *electronic system*.

Perkembangan teknologi selalu membawa perubahan terhadap perkembangan jaman. Petani yang dulunya mengelola sawah dengan sapi, kini sudah beranjak menggunakan traktor sebagai alat yang digunakan untuk mengelola sawah pertanian sehingga bisa efektif dan lebih cepat. Pemotong ayam yang dulu mencabut bulu ayam secara manual, sekarang sudah ditemukan mesin yang bisa membersihkan bulu ayam dengan sekejap. Pegawai yang dulunya menggunakan mesin ketik untuk membuat laporan keuangan sekarang sudah beranjak menggunakan komputer sehingga pekerjaan bisa lebih rapi dan mudah.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan karena hal tersebut memberikan kemudahan-kemudahan yang signifikan dalam efisiensi penggunaan waktu. Hal ini mengharuskan suatu organisasi agar secara terus menerus melakukan perubahan dan pemanfaatan teknologi agar dapat bersaing di masa kini. Pemanfaatan teknologi juga dilakukan sistem pemerintahan sehingga laporan pertanggungjawaban yang dibuat bisa bersifat legal dan sesuai dengan aturan.

Terbitnya peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membentuk sistem yang bersih dan jauh dari korupsi khususnya pada penggunaan anggaran

yang tentunya sangat penting untuk diawasi. Penggunaan teknologi yang selaras dengan aturan pemerintah agar terciptanya peningkatan produktivitas dan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Melalui kemajuan teknologi juga diharapkan terciptakan *e-Government* sehingga kepercayaan dan transparansi pelayanan publik semakin meningkat.

E-Government merupakan sistem informasi manajemen dalam bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang digunakan sebagai media informasi dan komunikasi secara interaktif antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat dan sesama lembaga pemerintahan itu sendiri. *e-Government* yang dilakukan oleh pemerintah dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud transparansi dalam pelayanan publik (Nur, 2014). Dari sudut pemerintahan *e-Government* juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi baik intern di kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun masyarakat. Adanya *e-government*, pemerintah juga memberikan inovasi terhadap suatu sistem keuangan yang bisa memberikan kemudahan kinerja organisasi pemerintah yaitu *e-budgeting*. Dari penerapan *e-budgeting* ini diharapkan pemerintahan akan menjadi semakin baik dan mengarah ke *good governance*.

Ada beberapa prinsip *Good Governance* menurut UNDP (United Nation Development Programme), 1997, yaitu (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) tanggung jawab, (5) berorientasi pada kesepakatan, (6) keadilan, (7) efektifitas dan efisiensi, (8) akuntabilitas, (9) visi strategik. Prinsip-prinsip itulah yang melekat pada sebuah pemerintahan dalam rangka mencapai apa yang diharapkan sehingga hubungan yang baik dengan masyarakat dapat dirasakan. Pemerintah tentunya dari sejak dahulu telah menjalankan ataupun merencanakan program-program dalam

rangka adanya pembangunan nasional baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Tetapi dari sekian banyak prinsip *good governance* peneliti hanya mengambil dua prinsip yaitu transparansi dan akuntabilitas, ini berkaitan dengan pokok masalah yang di ambil di tempat penelitian dan beberapa jurnal yang terkait.

Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas (Rinaldi, 2012). Menurut Sawitri et al. (2015) pemerintah sebaiknya memiliki akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik sehingga bisa meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Terciptanya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan harapan dari seluruh masyarakat tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi setiap insan negeri ini. Pemerintah diberikan syarat mutlak sebagai pengayom masyarakat agar transparansi anggaran selalu terjaga dan digunakan dengan baik. Menurut Mardiasmo (2002) *good governance* merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. *Good governance* memiliki hubungan yang signifikan dengan *e-Government*. Penerapan *e-Government* diharapkan bisa menciptakan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Mardiasmo (2009) terdapat prinsip-prinsip *good government* yang di jabarkan seperti: akuntabilitas, transparansi, demokrasi, dan aturan hukum. Lebih lanjut dari hasil penelitian Gunawan (2016) memperoleh hasil bahwa dari penerapan *e-budgeting* dapat memberikan dampak signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pada proses pengelolaan keuangan publik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara tidak langsung *e-budgeting* memiliki peranan dalam terciptanya *good governance*.

Harapan akan terciptanya *good governance* sepertinya sulit untuk direalisasikan. Tingginya angka korupsi dikalangan pejabat kita bisa dijadikan tolak ukur bahwa negara memiliki masalah

yang sangat pelik di sistem pemerintahan kita. Permasalahan tersebut menyebabkan kurangnya kualitas pelayanan publik. Rinaldi (2012) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah: Kualitas SDM yang masih rendah (masih kurang kesadaran dan motivasi dalam pemberian pelayan), Sistem dan prosedur pelayanan yang masih panjang dan rumit, Belum adanya Standar Pelayanan Minimal dalam pengurusan izin bidang pelayanan publik yang menyangkut prosedur, waktu, dan biaya.

Implementasi dari terciptanya *e-Government* dapat dilakukan melalui terlaksananya *e-Budgeting* dalam suatu pemerintahan. *e-Budgeting* merupakan salah satu perwujudan implementasi *e-Government* dalam mengelola keuangan pemerintah. Sistem ini dikembangkan untuk mempercepat proses perencanaan dan anggaran pemerintah. Selain itu, *e-Budgeting* merupakan salah satu cara untuk menghadapi permasalahan internal organisasi pemerintah dalam menyusun anggaran. Penggunaan *e-Budgeting* sangat penting dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dan anggaran untuk memberantas penyimpangan anggaran di daerah. Di Indonesia yang telah menerapkan sistem *e-Budgeting* yang sudah berjalan cukup lama, walaupun belum optimal. Salah satu kegagalan dalam mengimplementasikan suatu sistem ini dikarenakan adanya faktor manusia, yaitu penolakan atas sistem tersebut. Karenanya, penting untuk memahami mengapa seseorang menerima atau menolak sistem informasi berbasis teknologi. Fenomena ini mencerminkan bahwa sistem *e-Budgeting* sangat di butuhkan untuk memperkuat adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.

Penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah. Semua informasi tersebut

digunakan oleh pihak yang terkait dengan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah terhadap masyarakat sebagai sumber dana. Tujuan-tujuan itulah yang menyebabkan diperlukannya sebuah standar yang memuat pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan pemerintah paling tidak adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal tersebut disebabkan karena organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menggunakan sumber dana publik sehingga harus memberikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas.

Anggaran memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintah. Anggaran sebagai alat kebijakan, perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya pemerintah mewujudkan kemakmuran masyarakat. Sistem penganggaran pada pemerintah Indonesia telah mengalami pergeseran dari sistem anggaran tradisional menjadi anggaran kinerja (Halim & Kusufi, 2012). Pergeseran ini terjadi karena akuntabilitas dan transparansi yang kurang dalam pengelolaan anggaran. Sistem anggaran kinerja tidak hanya menekankan pada input anggaran seperti pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga pada *output* dan *outcome*. Hal ini mengisyaratkan bahwa penganggaran kinerja memiliki tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Nordiawan, 2007).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar adalah dengan menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Namun, pada tahun 2010 disahkan peraturan baru mengenai SAP yaitu tentang sistem akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Perwujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan laporan keuangan

pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta dilaporkan tepat waktu dan dapat diandalkan. Adanya Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan setiap pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan daerahnya dengan baik dan benar serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar tercipta pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki hal terpenting yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif (Zeyn, 2011).

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian sebelumnya, diperoleh bahwa banyak manfaat yang didapatkan dari adanya *e-Budgeting*, yang dimana dalam penerapan *e-Budgeting* ini membuat transparansi semakin baik terlihat di masyarakat. Seperti pada hasil penelitian Gunawan (2016) memperoleh hasil bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah di kota Surabaya telah terwujud. Realisasi akuntabilitas bisa dilihat dari upaya pemerintah mempublikasikan pelaksanaan proses penganggaran dan program kegiatan Pemerintah Kota secara menyeluruh. Perwujudan transparansi informasi anggaran dalam penelitian ini dapat dilihat melalui informasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Implementasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur operasional standar. Hasil ini mengindikasikan bahwa *e-Budgeting* merupakan suatu sistem yang seyogyanya dilaksanakan oleh instansi pemerintah sehingga bisa melakukan control terhadap transparansi serta akuntabilitas dalam proses keuangan publik di instansi tersebut. Melalui *e-Budgeting*, transparansi dan akuntabilitas akan semakin jelas terlihat sehingga kecurangan-kecurangan yang umumnya terjadi saat ini bisa diminimalisir. Hasil penelitian ini dijadikan peneliti sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, demikian halnya dengan metode penelitian yang akan

dilakukan dalam penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini mengkombinasikan dua jurnal sehingga memperoleh kebaharuan berupa penggabungan variabel dan metode yang di gunakan untuk menganalisis sistem *e-budgeting*. Adapun sistem *e-budgeting* yang di teliti menggunakan model CIPP baik dari segi *context, input, process, product*, Seyogyanya penelitian ini dapat menjadi lebih komprehensif dan memiliki kebaharuan dari penelitian sebelumnya.

Adanya perkembangan teknologi tentunya memberikan dampak terhadap penggunaan *e-Budgeting* sebagai sarana dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Damai (2016) *e-Budgeting* merupakan suatu aplikasi teknologi informasi untuk mendukung siklus perencanaan, pembuatan program, hingga pada tahapan kendali dan evaluasi suatu sistem. Implementasi dari sistem *e-Budgeting* tentunya diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Menurut Yuniarta dan Purnamawati (2020) kunci dari transparansi dari pemerintahan dipengaruhi oleh kondisi finansial pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

E-Budgeting, transparansi dan akuntabilitas merupakan variabel penting dalam proses berjalannya suatu organisasi masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang kian luntur terhadap sistem pemerintahan, hendaknya harus ditanggulangi sehingga bisa menciptakan kondusifitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya sistem *e-Budgeting* diharapkan bisa memperbaiki sistem pengelolaan keuangan publik yang selama ini masih belum optimal. Semakin seringnya oknum-oknum penjabat yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) tentu merupakan hal yang pelik di tengah krisis Pandemi Covid-19 yang kita alami saat ini. Hal ini mempertegas bahwa penelitian ini relevan dan layak untuk dilaksanakan, sesuai dengan kajian di atas.

Menurut hasil penelitian Rahman et al., (2018) menyatakan bahwa penggunaan *e-Budgeting* sebagai sistem pengelolaan anggaran publik sangat layak untuk dilaksanakan karena terbukti efektif jika ditinjau melalui model CIPP (*Context, Input, Process, and Product*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada tahapan konteks (*context*), implementasi *e-Budgeting* berhasil mencapai tujuan awal, yaitu transparansi dan akuntabilitas anggaran. Selanjutnya ditinjau dari masukan (*input*), penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sudah memadai. Ditinjau dari proses (*process*), *e-Budgeting* mempermudah dan meminimalisasi kesalahan dalam proses penyusunan RKA. Serta, ditinjau dari output (*product*), *e-Budgeting* meningkatkan kualitas APBD dari sisi kesesuaian dengan dokumen perencanaan RPJMD, serta manajemen kendali anggaran yang berperan aktif. Hasil penelitian ini peneliti jadikan rujukan utama dalam melaksanakan penelitian nantinya. Variabel *e-Budgeting* akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dengan menganalisis pada tahapan *context, input, process*, dan *product*.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu narasumber yaitu pegawai di Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Karangasem, yang bernama I Gede Harsiks Krisnawan S.H. dengan jabatan Sekretaris, memperoleh simpulan yang mengidentifikasi bahwa implementasi *e-budgeting* di SKPD tersebut masih belum optimal. Hal tersebut di sebabkan karena pegawai masih berkendala dalam melakukan input data dan pengoperasian sistem. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan penelitian terkait dengan *e-budgeting* dengan metode CIPP untuk mendalami dan mengkonfirmasi kendala tersebut dalam proses pelaksanaan *e-budgeting*.

Lebih lanjut *e-budgeting* juga akan di analisis terkait dengan dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di SKPD Karangasem. Terciptanya *good governance* bisa diawali dengan terlaksananya pengelolaan yang akuntabel melalui salah satunya pada penyajian laporan keuangan yang baik dan benar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana implementasi sistem *e-Budgeting* melalui model CIPP di SKPD Kabupaten Karangasem? *Kedua*, apakah transparansi keuangan publik dapat terlihat di SKPD Kabupaten Karangasem? *Ketiga*, bagaimana akuntabilitas keuangan publik dapat berjalan seiring dengan adanya transparansi keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem? *Keempat*, bagaimana implementasi sistem *e-Budgeting* dan dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas di SKPD Kabupaten Karangasem?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Lokasi dalam penelitian ini di 10 SKPD di Kabupaten Karangasem, mengingat tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendefinisikan dan menemukan suatu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan tehnik wawancara, angket dan dokumentasi di lapangan, sedangkan proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Narasumber yang digunakan dalam penelitian adalah anggota SKPD Kabupaten Karangasem yang merupakan pengguna sistem *e-budgeting*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi e-budgeting melalui Model CIPP

Evaluasi Konteks (*Context*)

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan *e-budgeting* dilakukan agar terciptanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Pelaksanaan *e-budgeting* di SKPD Kabupaten Karangasem sudah berjalan dengan baik yang terlihat pada evaluasi konteks melalui model CIPP. Pada tahap evaluasi konteks selain tujuan yang menjadi fokus utama yaitu kesesuaian antara implementasi *e-budgeting* dengan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah, hasil menunjukkan bahwa penerapan *e-budgeting* sudah sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2005 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*, Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Pemendagri) No. 13 tahun 2006 mengenai pengelolaan keuangan daerah yang lebih maju.

Evaluasi Masukan (*Input*)

Evaluasi input menunjukkan implementasi *e-budgeting* pada SKPD Kabupaten Karangasem dilihat dari aspek infrastruktur teknologi informasi dan infrastruktur manusia dapat dikatakan sudah sesuai walaupun belum optimal. Dari segi infrastruktur teknologi informasi pada pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan baik Hardware dan Software sudah memadai, hanya saja diperlukan beberapa perbaikan terhadap jaringan internet yang terkadang menyebabkan kendala dalam proses pengelolaan data.

Temuan lain juga mengindikasikan bahwa sumber daya manusia yang belum optimal karena pelatihan yang masih kurang dalam pengimplementasian sistem tersebut. Seyogyanya pelatihan bisa dilaksanakan lebih intensif sehingga pengguna sistem bisa menguasai sistem tersebut dengan maksimal.

Evaluasi Proses (*Process*)

Menurut Arikunto (2014) evaluasi proses dalam model CIPP diarahkan pada seberapa jauh kegiatan dilaksanakan dalam program tersebut sudah terlaksana

sesuai rencana. Hasil evaluasi proses menunjukkan secara teknis implementasi *e-budgeting* pada SKPD Kabupaten Karangasem yang sudah berjalan kurang lebih sejak tahun 2015 dan selalu mengalami perkembangan serta berinovasi sesuai kebijakan dan permasalahan yang muncul, sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat hingga saat ini. Evaluasi proses mengungkapkan bahwa, penerapan *e-budgeting* pada proses pengelolaan keuangan daerah memberikan dampak yang positif. Karena *e-budgeting* dapat membantu dan mempermudah pengelolaan keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem.

Evaluasi Produk (*Product*)

Hasil evaluasi produk atau output mengungkapkan bahwa dengan implementasi *e-budgeting* pada SKPD Kabupaten Karangasem, sistem ini membantu pada proses penyusunan pengelolaan keuangan publik yang nilai dan komponen di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil evaluasi produk lainnya menunjukkan dengan menggunakan *e-budgeting* proses penyusunan anggaran lebih singkat dan tepat waktu, meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam hal penyiapan anggaran belanja daerah, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi anggaran. Selain itu, dengan menggunakan *e-budgeting* meningkatkan kualitas APBD dari sisi kesesuaian dengan dokumen perencanaan hingga dokumen pertanggungjawaban yang sudah sesuai dengan aturan pemerintah.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Publik

Transparansi merupakan suatu kondisi tersedianya informasi yang secara langsung dapat diakses kepada pihak-pihak yang menjadi pelaksana keputusan. Jika dikaitkan dengan pengertian ini, pemerintah desa adalah pihak yang wajib untuk menyediakan akses informasi dan masyarakat desa merupakan pihak yang berhak atas informasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa konsep transparansi menekankan keterbukaan pemerintah

Hasil penerhadap masyarakat, agar masyarakat mengetahui apa yang terjadi (Purnamawati, 2018)

Kerangka Hukum Bagi Transparansi

Penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan publik mengacu pada Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menjadi dasar SKPD untuk melakukan transparansi pengelolaan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa kerangka hukum terkait dengan transparansi keuangan publik sudah diimplementasikan dengan baik di SKPD Kabupaten Karangasem.

Akses Masyarakat Terhadap Transparansi Anggaran

Akses masyarakat terhadap transparansi anggaran di SKPD Kabupaten Karangasem masih belum optimal. Informasi yang bisa diperoleh masyarakat masih terbatas, sehingga menunjukkan bahwa transparansi masih belum berjalan secara maksimal.

Adanya Audit yang Efektif

Pengawasan keuangan publik sangat penting untuk dilaksanakan, agar pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan benar. Pengawasan harus dilakukan dengan baik sehingga segala praktik kecurangan bisa diminimalisir bahkan tidak ada kecurangan sam sekali. Pengawasan keuangan bisa dilakukan dengan audit atau pembentukan instansi yang berfungsi untuk melakukan pengawasan keuangan. Instansi tersebut biasanya adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang berfungsi melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan di suatu lembaga. Tentunya juga terdapat instansi/Lembaga lain yang bisa melakukan audit dalam pengelolaan keuangan publik.

Audit dilakukan di SKPD Kabupaten Karangasem biasa dilakukan oleh Inspektorat Daerah (Irda) atau bahkan hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggung jawab agar penggunaan anggaran bisa terlaksana dengan baik dan sesuai aturan yang

berlaku. Adanya audit diharapkan bisa menciptakan dan meningkatkan transparansi keuangan publik sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dalam implementasi pengelolaan keuangan publik.

Keterlibatan Masyarakat dalam Pembuatan Keputusan Anggaran

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran belum terlihat jelas dalam implementasi pengelolaan keuangan publik. Hal tersebut dikarenakan dalam pengelolaan anggaran, masyarakat hanya bisa mengakses hasil akhir dari pengelolaan anggaran tersebut. Masyarakat belum terlibat secara penuh dalam perencanaan anggaran keuangan publik.

Hal ini memberikan batasan terhadap pengawasan pengelolaan keuangan publik, sehingga peranan masyarakat masih terasa kurang pada tahapan ini. Menurut Katz (2004) menyatakan bahwa transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial di mana setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Adanya peranan masyarakat dalam pengelolaan anggaran diharapkan bisa menciptakan transparansi yang lebih baik, sehingga masyarakat bisa mengetahui bagaimana rancangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik

Tercapainya Tujuan dalam Pengelolaan Sistem e-budgeting

Tujuan utama dalam pengelolaan sistem *e-budgeting* adalah agar terciptanya sistem kerja yang efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terkait dengan tahapan evaluasi dalam *e-budgeting* pada model CIPP khususnya pada tahapan konteks, yang memperoleh hasil penelitian bahwa dengan adanya sistem *e-budgeting*, pengelola keuangan publik bisa dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

Pengimplementasian *e-budgeting* diharapkan bisa memudahkan pengelolaan keuangan publik sekaligus bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tersebut. Penilaian pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien, dan efektif atau belum bisa dilihat dari hasil dari laporan program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat bisa menilainya. Akuntabilitas juga dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas (Rinaldi, 2012).

Adanya Pengawasan oleh Tim Pelaksana

Pengawasan pengelolaan keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem, salah satunya dilakukan dengan pelaksanaan audit oleh pihak terkait, sehingga proses berjalannya pengelolaan keuangan publik bisa berjalan dengan baik dan benar. Pihak terkait biasanya melakukan audit melalui kunjungan ke lokasi SKPD ataupun laporan secara online. Mekanisme pengawasan sudah berjalan pada akuntansi sektor publik walaupun belum seefektif pada sektor privat. Hal ini dapat kita lihat dari adanya keberadaan lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Daerah, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, dan DPRD. Lembaga-lembaga tersebut tentunya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) menggunakan biaya yang bersumber dari keuangan negara.

Adanya Laporan Pertanggungjawaban

Pembuatan laporan pertanggungjawaban tentunya merupakan salah satu syarat dalam pengelolaan keuangan publik di Kabupaten Karangasem. Laporan pertanggungjawaban biasanya dilakukan untuk mempertanggungjawabkan program-program yang dilaksanakan dalam suatu instansi. Laporan pertanggungjawaban tersebut biasanya diinput secara manual atau *online* tergantung keperluan SKPD.

Hal ini sudah sesuai dengan pernyataan (Yahya, 2006) yang mengungkapkan bahwa Kerangka

konseptual akuntabilitas publik dapat dibangun di atas dasar empat komponen. Pertama, adanya sistem pelaporan keuangan. Kedua, adanya sistem pengukuran kinerja. Ketiga, dilakukannya audit. Sektor publik. Keempat, berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of publik accountability*).

Menurut Purnamawati dan Adnyani (2019) semakin tingginya komitmen organisasi, secara otomatis ikut pula meningkatkan kesuksesan dalam mencapai akuntabilitas publik. Hal ini mengindikasikan tingkat komitmen anggota organisasi dalam menjalankan suatu sistem dapat meningkatkan pencapaian suatu organisasi terkait dengan akuntabilitas publik mereka. Pentingnya akuntabilitas publik dalam pelayanan masyarakat sangatlah diperlukan sehingga kepercayaan masyarakat bisa didapatkan oleh suatu organisasi yang hari kian hari justru luntur karena beberapa faktor.

Adanya Keterlibatan Aktor Publik

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik masih belum terlihat secara signifikan. Hal tersebut bisa dilihat dari minimnya kontribusi masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem. Tentunya ini merupakan suatu kendala dalam pengelolaan keuangan publik di Kabupaten Karangasem. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan Keuangan Publik di Kabupaten Karangasem belum berjalan optimal, khususnya pada kontribusi masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik.

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal merupakan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak internal yang berkepentingan seperti pegawai, pejabat pengelola keuangan negara, dan badan legislatif. Sedangkan akuntabilitas eksternal adalah pertanggungjawaban kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan, seperti pembayar pajak, media massa, pemberi dana bantuan, dan investor atau kreditor.

Implementasi Sistem e-budgeting dan Dampaknya terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di SKPD Kabupaten Karangasem

Implementasi sistem *e-budgeting* di Kabupaten Karangasem sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut terindikasi dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem *e-budgeting* sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan evaluasi yang dilakukan peneliti melalui metode CIPP. Keempat tahapan evaluasi menunjukkan bahwa sistem tersebut sudah dilakukan dengan baik. Menurut Rahman et al., (2018) menyatakan bahwa penggunaan *e-budgeting* sebagai sistem pengelolaan anggaran publik sangat layak untuk dilaksanakan karena terbukti efektif jika ditinjau melalui model CIPP (*Context, Input, Process, and Product*). Hasil penelitian sesuai dengan teori yang ada yang mengindikasikan bahwa sistem *e-budgeting* di SKPD Kabupaten Karangasem sudah layak untuk digunakan dan dikembangkan lebih lanjut.

Dampak *e-budgeting* terhadap transparansi dan akuntabilitas sangatlah terlihat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-budgeting* memiliki peranan penting dalam terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian (Nasution & Ramadhan, 2019) yang memperoleh hasil penelitian bahwa sistem *e-budgeting* dalam meningkatkan nilai transparansi pada Pemerintah Kota Binjai telah tercapai. Lebih lanjut, sistem *e-budgeting* dalam meningkatkan nilai Akuntabilitas pada Pemerintah Kota Binjai juga sudah telah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *e-budgeting* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi pada suatu daerah. Hasil penelitian ini mempertegas kembali bahwa *e-budgeting* memiliki hubungan yang significant terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Perananan *e-budgeting* dapat dilihat secara langsung bahwa diciptakannya *e-budgeting* merupakan suatu langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas suatu

instansi, sehingga bisa terlihat bahwa *e-budgeting* tentunya memberikan peranan dan dampak dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas suatu sistem.

Sistem yang diciptakan pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan publik yakni *e-budgeting* bisa berperan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan SKPD Kabupaten Karangasem, walaupun tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik masih belum berjalan optimal karena factor peranan masyarakat yang masih belum berjalan dengan baik, namun dampak dari pelaksanaan sistem *e-budgeting* terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik sudah terlihat. Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi : hasil bersih tanpa proses analisis data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dengan table atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun simpulan dari penelitian ini adalah 1) Implementasi sistem *e-budgeting* di SKPD Kabupaten Karangasem yang ditinjau melalui model CIPP memiliki temuan sebagai berikut; a) evaluasi konteks (*context*): pelaksanaan *e-budgeting* diharapkan bisa mempermudah dan meningkatkan efisiensi pengelola keuangan publik sehingga bisa bekerja dengan baik dan efektif, b) evaluasi masukan (*input*): penggunaan infrastruktur teknologi informasi berupa sarana dan prasarana yang ada sudah baik dan memadai akan tetapi masih memiliki kelemahan terkait dengan kendala jaringan internet yang belum stabil, c) evaluasi proses (*process*): penggunaan sistem *e-budgeting* sudah dilaksanakan kurang lebih dari tahun 2015, yang tentunya memberikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik, d) evaluasi produk (*product*) sistem *e-budgeting* dapat mempermudah dan memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan keuangan publik sehingga harapan dari diimplementasikannya sistem tersebut bisa terpenuhi walaupun belum maksimal.

2) Transparansi keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem sudah terlihat, walaupun belum optimal secara keseluruhan yang dipaparkan sebagai berikut; a) kerangka hukum yang digunakan terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan publik yakni Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menjadi dasar SKPD di Kabupaten Karangasem untuk melakukan transparansi pengelolaan keuangan, b) akses masyarakat terhadap transparansi anggaran di SKPD Kabupaten Karangasem masih belum optimal, c) audit dilakukan di SKPD Kabupaten Karangasem biasa dilakukan oleh Inspektorat Daerah (Irda) atau bahkan hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggung jawab agar penggunaan anggaran bisa terlaksana dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku, d) keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran belum terlihat jelas dalam implementasi pengelolaan keuangan publik. 3) Akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem belum berjalan secara optimal, hal tersebut dipaparkan lebih rinci sebagai berikut; a) sistem *e-budgeting* digunakan agar terciptanya cara kerja yang efektif dan efisien, b) pengawasan pengelolaan keuangan publik dilakukan dengan pelaksanaan audit oleh pihak terkait, c) pembuatan laporan pertanggungjawaban dilakukan sebagai bentuk syarat audit yang dilakukan oleh pihak terkait, d) keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik masih belum terlihat secara signifikan. 3) Implementasi *e-budgeting* memberikan dampak terhadap transparansi dan akuntabilitas di lingkungan SKPD Kabupaten Karangasem, walaupun tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik masih belum berjalan optimal karena factor peranan masyarakat yang masih belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, adapun saran yang dapat disampaikan peneliti adalah 1) Bagi SKPD Kabupaten Karangasem agar mengadakan pelatihan

pengguna sistem *e-budgeting* perlu ditingkatkan sehingga pengguna bisa menguasai sistem dengan baik, Pengelolaan keuangan publik bisa dibuka lebih luas, sehingga masyarakat bisa memberikan dan melakukan pengawasan terhadap proses berjalannya pemerintahan. 2) Bagi Masyarakat seperti Masyarakat diharapkan agar selalu aktif dalam melakukan pengawasan khususnya dalam pengelolaan keuangan publik, sehingga bisa digunakan dengan baik dan tepat. Dan Selalu aktif dalam memberikan kritik yang membangun terhadap proses berjalannya pemerintahan agar bisa melakukan pengawasan dengan optimal. 3) Bagi Badan Pengawas Keuangan dan Pihak Terkait agar melakukan pengawasan yang frekuentif dan teliti, sehingga pengelolaan keuangan publik bisa terjaga serta transparansi dan akuntabilitas keuangan publik semakin baik lagi. 4) Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat menambahkan kajian teori yang mampu menunggu penelitian yang berkaitan dengan sistem *e-budgeting*, dan juga kembangkan dengan model CIPP dengan merujuk jurnal yang ada, karena penelitian yang di lakukan ini disadari masih banyak kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damai, S. G. F. (2016). *e-Budgeting: Mengawal Aspirasi Masyarakat dari Politik Kepentingan*. *Makalah. Fakultas Ilmu Komunikasi FISIP*.
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem *e-Budgeting* Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL*, 8(1), 72–102. journal.unesa.ac.id
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat.
- Katz. (2004). Transparency in Government How American Citizens Influence Public Policy. *Journal of Accountancy*, 1(1), 1–2.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *e-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669–693. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/49815/30216>
- Nordiawan. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Nur, E. (2014). Penerapan E-Goverment Publik Pada Setiap SKPD berbasis Pelayanan di Kota Palu. *Penelitian Komunkasi Dan Opini Publik*, 18(3), 265–280. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/view/331/267>
- Purnamawati, I. G. A. (2018). Dimensi Akuntabilitas Dan Pengungkapan Pada Tradisi Nampah Batu. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 312–330. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9019>
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. K. S. (2019). Peran Komitmen, Kompetensi, Dan Spiritualitas Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 227–240. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10013>
- Rahman, R. A. T., Irianto, G., & Rosidi. (2018). Implementasi *e-Budgeting* dengan Menggunakan Model CIPP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Sistem Informasi*. *Jurnal Sistem Informasi*, 14(2), 53–63. jsi.cs.ui.ac.id
- Rinaldi, R. (2012). Analisis Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Online Universitas Medan Area*. *Jurnal Universitas Medan Area*, 1(1), 22–34.
- Sawitri, M., Purnamawati, I. G. A., & Herawati, T. N. (2015). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Publik dan Job Relevant Information sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Bangli). *E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan*

Ganesha, 3(1), 1–11.

Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, 7(4), 27–29.

Zeyn, E. (2011). Pengaruh Good governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1–15.